

# MENEROPONG TAX GAP & EFEKTIVITAS TATA KELOLA FISKAL SEKTOR MINERBA

## Executive Summary



Sektor mineral dan batubara merupakan salah satu fondasi penting perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia dianugerahi cadangan minerba yang besar dan bernilai strategis secara global, menjadikannya memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai pasok dunia. Namun demikian, pengelolaan sektor minerba tidak hanya dituntut untuk menghasilkan penerimaan fiskal yang optimal, tetapi juga harus selaras dengan amanat konstitusi.

Dalam perjalanannya, sektor minerba menghadapi berbagai isu dan tantangan yang semakin kompleks. Fluktuasi harga komoditas global, dinamika geopolitik, tuntutan penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta risiko kesenjangan penerimaan negara akibat keterbatasan tata kelola dan integrasi data menjadi persoalan yang perlu dicermati bersama. Di sisi lain, kebijakan hilirisasi muncul sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, dan memperluas basis penerimaan negara, namun implementasinya memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor dan dukungan tata kelola yang kuat.

Berangkat dari kondisi tersebut, Seminar KOMPAK diselenggarakan sebagai forum strategis untuk membahas dan mendiskusikan secara komprehensif berbagai isu aktual di sektor minerba. Kegiatan ini menjadi ruang dialog lintas pemangku kepentingan untuk berbagi perspektif, pengalaman, serta gagasan terkait optimalisasi penerimaan negara, penguatan tata kelola fiskal, dan efektivitas kebijakan hilirisasi. Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, Seminar KOMPAK diharapkan mampu memperkaya pemahaman bersama atas tantangan dan peluang yang dihadapi sektor minerba.

Pada akhirnya, Seminar KOMPAK diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan pemikiran dan masukan kebijakan yang relevan dan aplikatif. Sinergi pemikiran yang terbangun dalam kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan sektor minerba ke depan mampu memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.



# Kontribusi Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak

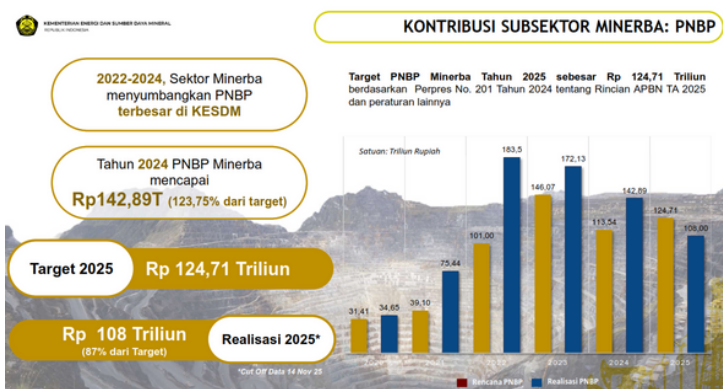
Totoh Abdul Fatah, S.Si., M.A.P.

Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara yang sangat besar dan menempatkannya sebagai salah satu negara dengan cadangan komoditas tambang terbesar di dunia, seperti nikel, bauksit, timah, emas, tembaga, besi, dan batubara. Potensi tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional karena sektor pertambangan tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan baku industri dan energi, tetapi juga sebagai penopang utama penerimaan negara. Besarnya sumber daya dan cadangan mineral menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya ungkit yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Sektor minerba merupakan penopang utama PNB yang strategis bagi penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah nasional”

Kontribusi sektor mineral dan batubara terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercermin dari realisasi penerimaan yang konsisten dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan batubara sebagai penyumbang terbesar, diikuti oleh nikel, emas, dan tembaga. PNBP minerba berasal dari berbagai jenis kewajiban, antara lain iuran tetap, iuran produksi atau royalti, penjualan hasil tambang, pemanfaatan barang milik negara, serta bagian pemerintah dari keuntungan bersih. Tingginya realisasi PNBP menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal, khususnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola, pemerintah mendorong transformasi digital melalui penerapan sistem e-PNBP Minerba yang terintegrasi dengan ekosistem SIMBARA. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan akibat proses manual dan ketidaksinkronan informasi. Selain itu, kebijakan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi menjadi arah strategis pengelolaan minerba, agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan penerimaan negara yang optimal, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.



**PENINGKATAN NILAI TAMBAH DALAM NEGERI**

**Low Impact of Economic Growth**

1. Eksploitasi mineral dan batubara dengan manfaat ekonomi yang belum optimal  
2. Ketergantungan impor bahan baku industri dan energi  
3. Tingginya ketergantungan ekonomi lokal terhadap aktivitas Pertambangan

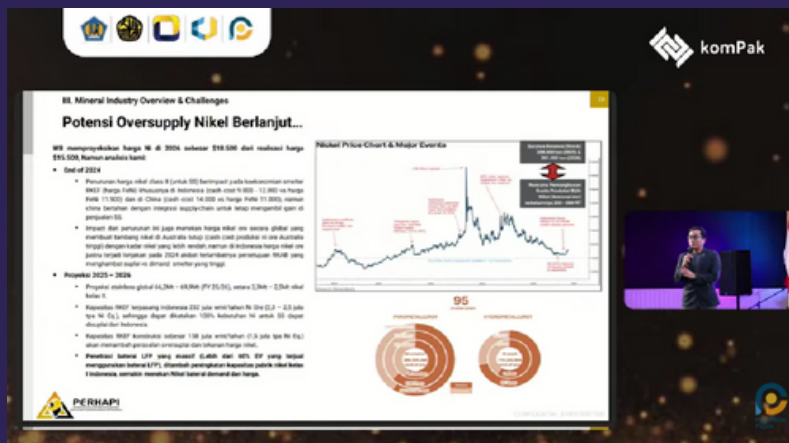
**SEMANGAT TRANSFORMASI EKONOMI PADA UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERBA (UU 4/2009 Jo UU 2/2025)**

**Leverage of Economic Growth**

- Meningkatkan PDB & PDRB dari pengelolaan SDA
- Menyediakan bahan baku industri hilir
- Meningkatkan serapan tenaga kerja
- Meningkatkan nilai ekspor
- Meningkatkan Penyediaan Energi

# Penerimaan Negara vs Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

## Ir. Resvani, MBA



“Pengelolaan sektor minerba harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan sesuai amanat konstitusi”

Materi ini menegaskan bahwa sektor mineral dan batubara (minerba) merupakan aset strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara sekaligus pembangunan ekonomi. Indonesia dianugerahi sumber daya dan cadangan minerba yang besar dan beragam, sehingga menempatkannya sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok global. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Pengelolaan sektor minerba secara tegas dikaitkan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan minerba tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya penerimaan negara, melainkan juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah penghasil tambang.

Materi ini juga menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi sektor minerba, baik dari sisi global maupun domestik. Fluktuasi harga komoditas dunia, dinamika geopolitik, potensi kelebihan pasokan, serta tuntutan penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi tantangan eksternal yang harus diantisipasi. Sementara itu, di dalam negeri masih terdapat persoalan seperti pertambangan tanpa izin, kompleksitas regulasi, serta perlunya penguatan tata kelola agar pengelolaan minerba dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.



### IV. Perspektif Industri Terhadap Kebijakan Fiskal Minerba

#### “Kesimpulan Perspektif Industri

- Beberapa hal yang menjadi tantangan pelaku industri Minerba yang terkait fiskal saat ini:
  - Turunnya harga komoditas kecuali Emas dan Tembaga,
  - Kenaikkan cash cost seperti B40 (meningkatkan biaya stripping OB & Hauling), Penerapan PBB, Kenaikan tarif royalty, dll
  - Kebijakan DHE yang menekan Arus Kas Perusahaan,
- Kebijakan tarif royalty baru menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif royalti tertinggi di Dunia.
- Pola TGT yang terbalik, di mana TGT lebih tinggi pada kondisi sulit (harga turun, SR meningkat, kadar/kalori rendah, jarak angkut naik).
- Pola royalti & TGT tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan cadangan marginal yang berdampak pada turunnya volume penerimaan negara dalam jangka Panjang, turunnya daya saing dalam proses industrialisasi masa depan (hilangnya comparative advantage), dan dalam proses operasi produksi berpotensi turunnnya kualitas penerapan Good Mining Practice.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, materi ini menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Hilirisasi dipandang sebagai strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta memperkuat struktur industri nasional. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, tata kelola yang baik, dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat, sektor minerba diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

# Hilirisasi dan Optimalisasi Penerimaan Negara Sektor Minerba

Hadi Setiawan S.S.T, M.A.

Materi ini menekankan bahwa hilirisasi sektor mineral dan batubara (minerba) merupakan strategi utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabil, dan merata. Hilirisasi dipandang sebagai upaya struktural untuk mengubah ketergantungan Indonesia dari ekspor bahan mentah bernilai tambah rendah menjadi produksi barang setengah jadi dan barang jadi dengan nilai tambah yang jauh lebih besar. Dengan pendekatan ini, sektor minerba tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tetapi juga sebagai motor penggerak industrialisasi nasional dan penguatan daya saing global.

Dalam kerangka fiskal, sektor minerba memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, termasuk pajak, kepabeanan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, penerimaan tersebut masih dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas global dan struktur produksi yang didominasi ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui kebijakan fiskal yang seimbang, antara lain pemberian insentif perpajakan untuk industri pengolahan, penguatan pengawasan tata kelola, serta penerapan instrumen disinsentif seperti larangan ekspor dan bea keluar guna menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri dan mendorong hilirisasi.

Materi ini juga menggarisbawahi peran strategis komoditas utama seperti batubara dan emas. Batubara diposisikan sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus jembatan menuju transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara itu, pengelolaan emas diarahkan untuk mendukung hilirisasi, menjaga cadangan nasional, serta membangun ekosistem bullion bank guna memperdalam sektor keuangan. Kebijakan bea keluar dan pengaturan ekspor menjadi instrumen penting untuk memastikan terciptanya nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat penerimaan negara.

**APBN 2026:**  
Untuk mendukung pertumbuhan tinggi, kebijakan fiskal didesain ekspansif dan terukur dengan defisit 2,68% PDB

**"APBN dijaga Sehat dan Kredibel"**  
Optimalisasi Pendapatan, Penguatan Kualitas Belanja, dan Inovasi Pembiayaan

**Belanja Negara**  
Rp3.842,7 T

Penguatan kualitas belanja:  
• Fokus 8 Agenda Prioritas;  
• Efisiensi dan efektivitas belanja;  
• Sinergi dengan Danantara untuk investasi produktif

**Pendapatan Negara**  
Rp3.153,6 T

Optimalisasi Pendapatan dengan Menjaga Iklim Investasi

**Defisit Terkendali**  
Rp689,1 T (2,68% PDB)

Pembiayaan prudent, inovatif, dan sustainable

**PERKEMBANGAN EMAS Mendukung Penguatan Hilirisasi dan Ekosistem Bullion Bank di Indonesia**

**Prioritas Pengembangan Komoditas Emas**

- Mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi.
- Mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank (perdagangan, penitipan, simpanan, dan pembiayaan emas).
- Mendukung optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas.

**Cadangan tambang emas Indonesia terus berkurang**

Share Cadangan Tambang Emas Dunia USGS, 2024

Cadangan Bijih Emas Indonesia - ESDM (ton)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Estimasi	4.000	3.500	3.500	3.027	3.000	3.000

- Indonesia memiliki cadangan tambang emas terbesar ke-4 di dunia dengan share 5,8% (USGS, 2024).
- Cadangan bijih emas Indonesia terus mengalami penyusutan tiap tahunnya.

**Harga emas terus mengalami peningkatan**

Harga Emas Dunia - LBMA (USD / troy ons)

- Harga emas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- Di Q1-2025, rerata harga emas mencapai USD 2.862,6/troy ounce atau tumbuh 38,2% (yoy). November 2025, harga di USD4.076,6

Secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi dan optimalisasi penerimaan negara sektor minerba sangat bergantung pada sinergi kebijakan lintas sektor, mulai dari fiskal, industri, perdagangan, hingga lingkungan. Dengan tata kelola yang kuat, kebijakan yang konsisten, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sektor minerba diharapkan mampu mendukung agenda pembangunan nasional, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

"Hilirisasi sektor minerba merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, dan mengoptimalkan penerimaan negara secara berkelanjutan melalui sinergi kebijakan fiskal dan tata kelola yang kuat"

**BATUBARA UNTUK KETAHANAN ENERGI DAN JEMBATAN MENUJU TRANSISI ENERGI**  
Transisi Energi dilakukan secara bertahap, berkeadilan dan sustainable

- Batubara primer masih didominasi oleh energi fosil, terutama batubara.
- Batubara masih jadi tulang punggung energi nasional khususnya listrik dasar load, hal ini membantu menjaga tarif listrik tetap terjangkau bagi rumah tangga dan industri.
- Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan Batubara energi baru bayaran (EBTB) dan mencapai target NDC dan NZE tahun 2050 atau lebih cepat.
- Transisi energi dilakukan dengan bertahap, berkeadilan dan sustainable.

**Supply Energi Primer Indonesia (juta BOE)**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Estimasi	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800	2.700

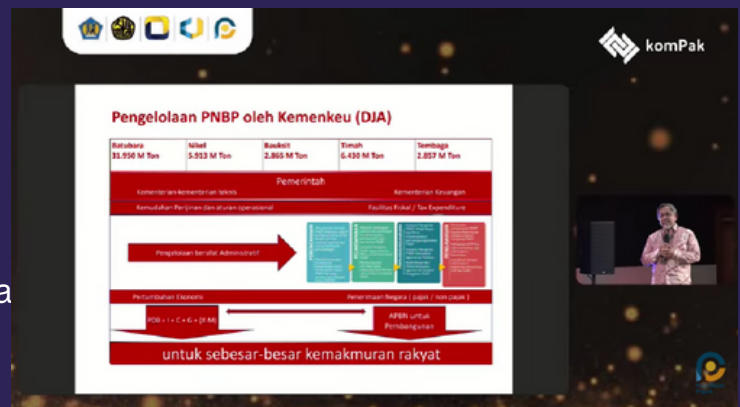
**"Swasembada Energi"**  
"Mempertahankan stok pertambangan keamanan negara dan mendingkankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru"

## PNBP dan Tata Kelola Minerba Kukuh Sumardiono Basuki, S.E., M. Sc.

Materi ini menyoroti peran strategis sektor mineral dan batubara (minerba) sebagai salah satu kontributor utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus aset penting dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Pengelolaan minerba secara tegas dikaitkan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, optimalisasi PNBP minerba tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi pembangunan nasional.

Materi ini menguraikan bahwa masih terdapat kesenjangan (gap) penerimaan PNBP sektor minerba yang disebabkan oleh berbagai permasalahan struktural, seperti asimetri informasi, monopoli dan fragmentasi data, penggunaan harga acuan yang tidak konsisten, serta dinamika pasar global yang sulit dikendalikan. Selain itu, lemahnya sinergi regulasi, kualitas data yang belum optimal, rendahnya efektivitas pengawasan, serta masih maraknya praktik pertambangan ilegal turut berkontribusi terhadap potensi kebocoran penerimaan negara. Kondisi ini menuntut adanya reformasi tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan terintegrasi.

“Penguatan tata kelola PNBP sektor minerba melalui integrasi data, transparansi, dan kolaborasi lintas instansi merupakan kunci untuk menutup celah penerimaan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan”



Sebagai solusi, materi ini menekankan pentingnya integrasi data lintas instansi dan penguatan transparansi sebagai prasyarat utama efektivitas tata kelola fiskal sektor minerba. Pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dipandang sebagai langkah strategis untuk menyatukan data perizinan, produksi, penjualan, pembayaran PNBP, hingga distribusi dan ekspor. Integrasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan risiko kebocoran penerimaan negara.

Secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola PNBP sektor minerba harus dilakukan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, integrasi sistem informasi, dan kolaborasi lintas instansi. Dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, sektor minerba diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan negara yang stabil dan optimal, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



# PNBP dan Tata Kelola Minerba

## Ihsan Priyawibawa, S.S.T., MBT



Materi ini juga mengulas tantangan kepatuhan wajib pajak (WP) sektor minerba yang ditandai oleh risiko bawaan yang tinggi, terutama pada WP berskala besar dengan struktur grup usaha yang kompleks dan transaksi afiliasi yang intensif. Kondisi tersebut membuka potensi praktik penghindaran pajak, seperti penggeseran laba melalui skema transfer pricing. Selain itu, lokasi usaha yang terpencil dan masih adanya aktivitas pertambangan ilegal turut menyulitkan pengawasan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan.

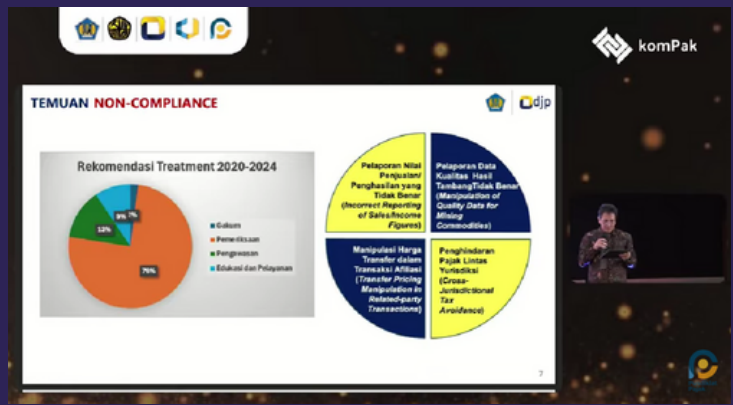
Sebagai respons, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko melalui pemanfaatan Compliance Risk Management (CRM). CRM digunakan untuk memetakan profil risiko kepatuhan WP sektor minerba dan menentukan strategi pengawasan yang tepat sasaran. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada penguatan penghimpunan dan integrasi data internal dan eksternal, pembangunan basis data WP grup dan high wealth individual (HWI), serta peningkatan kolaborasi lintas instansi dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan WP dan memperkuat penerimaan pajak sektor minerba secara berkelanjutan.

### TANTANGAN WP MINERBA

- Risiko bawaan WP berskala besar**
  - WP Minerba yang memiliki struktur grup usaha yang kompleks dan transaksi afiliasi yang tinggi
  - berpotensi untuk menggeser laba melalui skema transfer pricing sehingga mengikis basis pajak
- Data dan informasi yang tersebar**
  - Fragmentasi dan inkonsistensi data antar instansi yang tersebar
  - menciptakan tantangan dalam membangun profil risiko yang terintegrasi, sehingga dapat mempengaruhi pengawasan dan analisis
- Pertambangan ilegal**
  - Lokasi usaha yang terpencil membatasi pengawasan, sehingga dapat memicu aktivitas ekonomi tidak tercatat
  - manipulasi laporan usaha legal
  - praktik penambangan ilegal yang menghindari sistem perpajakan.



“Penguatan kepatuhan wajib pajak sektor minerba melalui pengawasan berbasis risiko dan integrasi data menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan optimalisasi penerimaan pajak di tengah fluktuasi harga komoditas global”



## Diskusi

Diskusi dalam sesi tanya jawab mengemuka sebagai ruang refleksi kritis terhadap efektivitas pengelolaan sektor mineral dan batubara (minerba) dalam mendukung penerimaan negara. Para peserta dan narasumber menyoroti masih belum optimalnya kontribusi sektor minerba dari sisi perpajakan, PNBP, serta kepabeanaan dan cukai, meskipun potensi ekonomi sektor ini sangat besar. Berbagai temuan lapangan diangkat, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keberadaan pelaku usaha dengan omzet signifikan yang belum terdaftar secara formal, serta maraknya praktik pertambangan ilegal yang berada di luar sistem pengawasan negara.

Lebih lanjut, diskusi menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kelemahan tata kelola dan perizinan. Ketidaksinkronan data antarinstansi, perbedaan data produksi dan penjualan, tumpang tindih wilayah izin, serta ketidakakuratan data NPWP menjadi faktor yang memperbesar risiko kebocoran penerimaan negara. Selain itu, praktik manipulasi harga dan pemanfaatan skema perpajakan yang tidak semestinya, termasuk dalam penerapan harga acuan komoditas, dipandang sebagai tantangan serius yang membutuhkan pengawasan yang lebih kuat dan berbasis data yang andal.



Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, para narasumber menekankan bahwa integritas data dan integritas sumber daya manusia merupakan kunci utama perbaikan pengelolaan sektor minerba. Meskipun pemerintah telah memiliki kerangka regulasi dan instrumen pendukung seperti kebijakan Satu Data Indonesia dan sistem SIMBARA, implementasi interoperabilitas data lintas instansi masih menghadapi hambatan, antara lain ego sektoral dan keterbatasan pemanfaatan data secara bersama. Oleh karena itu, penguatan integrasi sistem, konsistensi penggunaan data acuan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola dan pemeriksa menjadi langkah strategis yang terus didorong.

Pada akhirnya, diskusi menyimpulkan perlunya penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan sektor minerba. Pendekatan pengawasan berbasis risiko, penertiban tambang ilegal, peningkatan kualitas audit, hingga kemungkinan pelaksanaan audit gabungan lintas instansi dipandang sebagai solusi yang relevan untuk menutup celah penerimaan negara. Dengan kolaborasi yang solid, integritas pelaku yang terjaga, serta kebijakan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang, sektor minerba diharapkan mampu memberikan kontribusi fiskal yang optimal sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Penguatan integritas data, sinergi lintas instansi, dan pengawasan terpadu menjadi kunci utama untuk menutup celah penerimaan negara dan mengoptimalkan pengelolaan sektor minerba”



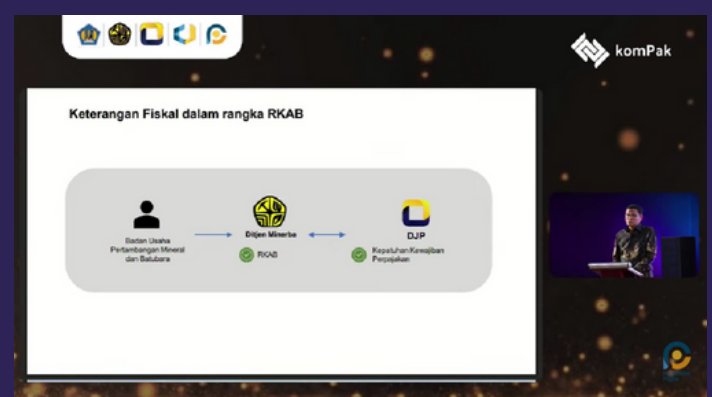
## Highlight Kepatuhan Wajib Pajak Pertambangan Mineral dan Batubara Bimo Wijayanto, S. E., A.k., M.B.A., Ph.D

Dalam seminar kali ini, Direktur Jenderal Pajak, Bp. Bimo Wijayanto menegaskan bahwa sektor mineral dan batubara merupakan sektor strategis yang sejak lama menjadi perhatian utama negara karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, namun hingga kini belum mampu memberikan nilai tambah dan penerimaan negara secara optimal. Meskipun sektor mineral berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan memiliki efek pengganda yang luas—mulai dari jasa pertambangan, logistik, hilirisasi, hingga sektor keuangan—masih terdapat berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaannya, terutama terkait pengamanan nilai tambah (value added) dan efektivitas kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial.

Materi yang disampaikan juga menyoroti adanya paradoks dalam tata kelola fiskal dan ekonomi sumber daya alam, di mana potensi besar sektor mineral belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Ketimpangan kepatuhan, lemahnya integritas pelaporan, praktik manipulasi harga, serta pemanfaatan celah sistem—baik di sisi hulu maupun hilir—menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, permasalahan perizinan, biaya ekonomi tinggi, serta lemahnya integritas sistem dan sumber daya manusia turut menghambat terciptanya iklim usaha yang adil, efisien, dan transparan.

Lebih lanjut, ditekankan pula bahwa reformasi tata kelola sektor mineral harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif, mulai dari perbaikan perizinan, integrasi data lintas instansi, hingga penguatan pengawasan ekspor-impor dan kepatuhan perpajakan. Inisiatif seperti SIMBARA dan keterbukaan data lintas kementerian/lembaga dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan, meningkatkan akurasi penghitungan penerimaan negara, serta menutup celah kebocoran. Namun demikian, keberhasilan reformasi tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama, profesionalisme, dan integritas seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, hal yang perlu digarisbawahi adalah pengelolaan sektor mineral bukan semata tanggung jawab satu institusi, melainkan kerja kolektif seluruh elemen negara dan masyarakat. Dukungan akademisi, konsultan, pelaku usaha, serta masyarakat sipil diperlukan sebagai bagian dari ekosistem pengawasan dan perbaikan kebijakan. Dengan menjunjung tinggi nilai kebangsaan, profesionalisme, dan independensi, reformasi sektor mineral diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kemakmuran rakyat.



“Integritas tata kelola dan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci pengamanan nilai tambah dan keadilan ekonomi sektor mineral”

## Kesimpulan

- Dari pemaparan para narasumber, terdapat beberapa isu kunci yang perlu digarisbawahi bersama. Isu utama tersebut adalah bahwa **transparansi dan akuntabilitas** masih menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan sektor minerba, khususnya dalam konteks optimalisasi penerimaan negara. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersusunnya desain dan roadmap industri minerba yang jelas, kebijakan yang belum sepenuhnya sinergis dan terintegrasi, serta kualitas data yang belum akurat dan belum tervalidasi secara memadai, sehingga menyulitkan pengukuran potensi ekonomi dan kinerja fiskal secara optimal.
- Dalam rangka menjembatani kesenjangan penerimaan (tax gap) yang ada saat ini, diperlukan **langkah-langkah strategis yang terukur**, antara lain melalui penguatan mekanisme pertambangan yang legal dan penertiban kegiatan pertambangan ilegal. Upaya tersebut akan mempermudah pengawasan, meningkatkan kepatuhan, serta membuka potensi penerimaan negara dan objek pajak baru. Selain itu, keberadaan roadmap industri minerba yang tegas dan berorientasi jangka panjang diharapkan dapat memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pertambangan minerba.
- Arah pengembangan industri minerba ke depan, sebagaimana disampaikan para narasumber, perlu **ditopang oleh penguasaan teknologi dan peningkatan nilai tambah**. Dengan demikian, kebijakan minerba tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga ketahanan industri nasional dan membangun fondasi industri masa depan. Diharapkan, masukan dari para peserta dan narasumber dalam diskusi ini dapat menjadi upaya bersama untuk memperkuat akuntabilitas serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor minerba.



“Minerba adalah anugerah alam, tetapi hanya dengan kepemimpinan yang bijaksana dan tata kelola yang adil, anugerah tersebut dapat diubah menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat.”

Plato

## Rekomendasi

- Pertama, penguatan tata kelola dan integrasi data lintas instansi perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan interoperabilitas data antara instansi terkait sektor minerba (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum) melalui pemanfaatan sistem terintegrasi seperti SIMBARA dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Integrasi ini harus diarahkan untuk menyatukan data perizinan, produksi, penjualan, pembayaran pajak, PNBP, dan ekspor-impor guna menutup celah tax gap serta meningkatkan akurasi pengawasan dan penghitungan penerimaan negara.
- Kedua, penyusunan dan penguatan roadmap industri minerba yang jelas, konsisten, dan berorientasi jangka panjang menjadi kebutuhan mendesak. Roadmap tersebut harus mencakup arah hilirisasi, penguasaan teknologi, pengelolaan lingkungan, serta kesinambungan fiskal, sehingga kebijakan minerba tidak bersifat sektoral dan parsial. Dengan roadmap yang kuat, kebijakan fiskal, industri, perdagangan, dan lingkungan dapat disinergikan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pertambangan.
- Ketiga, peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum secara terpadu perlu diperkuat melalui penertiban pertambangan ilegal, pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan audit bersama lintas instansi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar PNBP, menekan praktik manipulasi harga dan skema penghindaran pajak, serta menciptakan level playing field yang adil bagi pelaku usaha yang patuh.
- Keempat, penguatan integritas dan kapasitas sumber daya manusia baik di sisi aparatur maupun pelaku usaha menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi tata kelola sektor minerba. Pemerintah perlu mendorong peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami karakteristik industri ekstraktif, pemanfaatan data, dan pengawasan berbasis teknologi. Di sisi lain, pelaku usaha diharapkan meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan, dan kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan konstitusional.
- Kelima, penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, konsultan, dan masyarakat sipil perlu terus didorong. Forum diskusi seperti Seminar KOMPAK hendaknya dijadikan ruang berkelanjutan untuk bertukar gagasan, menyusun rekomendasi kebijakan, serta mengawal implementasi perbaikan tata kelola. Dengan kolaborasi yang solid dan berlandaskan nilai integritas serta kepentingan nasional, sektor minerba diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara, ketahanan industri, dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.



“Optimalisasi sektor minerba memerlukan tata kelola yang transparan dan terintegrasi untuk menutup tax gap dan memperkuat penerimaan negara”